

PENYIMPANGAN PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam patologi hukum dan penyimpangan yuridis praktis dalam implementasi *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dengan ruang lingkup penelitian terfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. Secara landasan filosofis, Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibangun di atas Asas *Ultimum Remedium* dan *Best Interest of the Child*, namun implementasi di tingkat adjudikasi seringkali terdistorsi menjadi paradigma retributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan utama terletak pada inversi hierarki sanksi (Pasal 60 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), yang di mana Hakim gagal mentransformasikan kewajiban *Ultimum Remedium* menjadi putusan yang mengutamakan anak dan justru memilih pidana penjara. Patologi ini diperburuk oleh dua faktor kausal, yang pertama, Formalisme Yudisial dan Penyimpangan Praktis, yang meliputi pengabaian mutlak terhadap rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) BAPAS (Pasal 24 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan yang kedua Tekanan Etis-Sosial, yang diaktualisasikan melalui dominasi *Trial by the Press* yang memaksa Hakim keluar dari lingkup *Restorative Justice* untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat dalam arti sempit. Untuk mengakhiri siklus regresi retributif ini, direkomendasikan transisi penyelesaian melalui Keadilan Transformatif (*Transformative Justice*) dan penguatan struktural melalui pembatasan diskresi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, serta peningkatan alokasi anggaran dan kapasitas BAPAS dengan tujuan untuk menjamin kredibilitas sanksi tindakan non-institusional.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, *Ultimum Remedium*, Anak, Patologi Hukum, Keadilan Transformatif.

**DEVIATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE
SETTLEMENT OF CRIMES AGAINST CHILDREN**

ABSTRACT

This research critically examines the legal pathology and practical juridical deviations in the implementation of Restorative Justice (RJ) within the Indonesian Child Criminal Justice System (SPPA), with the scope of study focused on the Padang District Court Verdict Number 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg. Philosophically, the SPPA Act is founded upon the Principles of Ultimum Remedium and the Best Interest of the Child, yet its implementation at the adjudication level is frequently distorted toward a retributive paradigm. The findings indicate that the primary deviation lies in the inversion of the sanctions hierarchy (Article 60 of the SPPA Act), where the Judge fails to transform the Ultimum Remedium obligation into a child-centered verdict and instead opts for imprisonment. This pathology is exacerbated by two causal factors: firstly, Judicial Formalism and Practical Deviation, which encompasses the absolute disregard for the recommendations of the BAPAS Community Research Report (Litmas) (Article 24 of the SPPA Act); and secondly, Ethical-Social Pressure, which is actualized through the dominance of the Trial by the Press, compelling the Judge to abandon the scope of RJ to satisfy the narrow demands of public justice. To terminate this cycle of retributive regression, a transition to Transformative Justice (TJ) is recommended, alongside structural reinforcement via the limitation of judicial discretion to impose imprisonment, and an increase in the budgetary allocation and capacity of BAPAS to guarantee the credibility of non-institutional sanctions.

Keywords: Restorative Justice, Ultimum Remedium, Child, Legal Pathology, Transformative Justice.